

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-59/PB/2020 tentang Pedoman Validasi dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). *Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-70/PB/PB.3/2023 tentang Penetapan Piloting Tahap Pelaksanaan Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara melalui Aplikasi SAKTI*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (n.d.). *Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI Modul Bendahara*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (n.d.). *Profil KPPN Bondowoso*. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bondowoso/id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2017 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.